

346.02

BAD

P

UPT-PUSTAK-UNDIP

No. Daft : 2143/KI/FA

Tgl. : 16-6-1997

MAKALAH

JUDUL :

PENCATATAN PERKAWINAN UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM

O L E H :

SITI MALINHAATUN RAIRIYAH, S.E.

NIP : 132 049 780

TELAAH DIDISKUSIKAN PADA DISKUSI BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

TANGGAL : 19 DESEMBER 1995

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	
I. PENDAHULUAN	1
II. PERMASALAHAN	3
III. PEMBAHASAN MASALAH	3
A. Pencatatan Perkawinan Dan Tata Caranya ...	3
B. Tujuan Pencatatan Perkawinan	9
IV. PENUTUP ...	12
A. Simpulan	12
B. Saran	12
DAFTAR BACAAN	13

PENCATATAN PERKAWINAN UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM

I. PENDAHULUAN

Tuhan menciptakan manusia dalam dua jenis kelamin, dan sudah menjadi kodrat manusia untuk hidup berpasangan dengan lawan jenisnya. Sehingga sudah sewajarnya jika timbul rasa ketertarikan dengan lawan jenisnya, kemudian timbul rasa ingin menyayangi dan disayangi, ingin memiliki dan hidup bersama. Agar kehidupan bersama antar manusia ini teratur dan tertib perlu adanya perkawinan yang diatur dalam suatu ketentuan khusus.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).

Untuk mencapai tujuan perkawinan, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tentu tidak mudah, karena persatuan dua orang yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda pula tentu akan menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu harus ada ikatan antara keduanya, yang berupa ikatan lahir maupun ikatan batin.

Adapun yang dimaksud ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat secara lahiriah, baik antara suami istri maupun masyarakat sekelilingnya. Sedangkan ikatan batin

adalah ikatan yang tidak terlihat. Ikatan batin ini meskipun tidak terlihat, harus ada untuk mencerminkan kerukunan suami istri. Yang diperlukan dalam pembentukan rumah tangga yang kekal abadi harus mempunyai ikatan lahir maupun bati, sehingga perkawinan tidak akan putus dengan alasan apapun kecuali putus karena kematian (Wibowo Reksopradoto, S.H., 1982 : 11).

Selubungan dengan hal di atas maka sudah sewajarnya jika diperlukan syarat-syarat dan tata cara tertentu untuk melangsungkan perkawinan supaya tujuan perkawinan tersebut dapat terwujud. Hal ini telah diatur secara khusus dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

Perkawinan menjadi sah setelah syarat-syarat dan peraturan yang ditentukan dipenuhi oleh kedua mempelai. Mengenai sahnya perkawinan telah diatur dalam pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang menetapkan sebagai berikut :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan ini akan dibahas lebih lanjut dalam makalah ini. Pencatatan ini sangat penting artinya, baik bagi suami istri maupun keturunan yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, juga untuk pihak ketiga. Dengan dilakukannya pencatatan maka ada bukti yang kuat mengenai perkawinan tersebut, yang berupa akta perkawinan.

II. PERMASALAHAN

Jika kita membicarakan tentang pencatatan perkawinan maka akan timbul banyak permasalahan. Oleh karena itu penulis hanya akan membahas beberapa diantaranya saja, supaya tulisan ini lebih mengarah pada judul di muka. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang dimaksud dengan pencatatan perkawinan ?
2. Mengapa dilakukan pencatatan perkawinan ?

III. PEMBAHASAN MASALAH

A. Pencatatan Perkawinan dan Tata Caranya

Perkawinan bukanlah sesuatu hal yang biasa, karena merupakan sesuatu yang sakral. Perkawinan ini mempunyai kaitan yang erat dengan agama. Bahkan dalam pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Selanjutnya dalam penjelasannya ditentukan bahwa, dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

Dengan melihat ketentuan di atas menunjukkan bahwa perkawinan ini bukan hanya menciptakan tanggung jawab terhadap sesama manusia, tetapi juga tanggung jawab manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Meskipun perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan sudah dianggap sah namun apabila tidak dilakukan pencatatan perkawinan, kurang menjamin kepastian hukum, sehingga bisa menimbulkan kesulitan di kemudian hari jika timbul masalah. Oleh karena itu pencatatan ini mempunyai arti penting.

Adapun tata cara pencatatan ini sudah diatur secara khusus dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang meliputi pemberitahuan, penelitian, pengumuman, dan saat pencatatan.

Pencatatan perkawinan untuk yang beragama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk. Sedangkan bagi orang yang beragama selain Islam dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

1. Pemberitahuan Untuk Melangsungkan Perkawinan

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan (Pasal 3 ayat 1 PP no. 9 tahun 1975).

Pemberitahuan tersebut harus dilakukan sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dapat diberikan oleh camat atas nama Bupati Kepala Daerah, apabila ada alasan yang penting.

Alasan penting dalam hal ini, misalnya karena sa-

lah seorang dari calon mempelai akan segera pergi ke luar negeri untuk melaksanakan tugas negara, maka dapat mengajukan permohonan dispensasi (Penjelasan Pasal 3 ayat 3 PP No. 9 Tahun 1975).

Pada prinsipnya kehendak untuk melangsungkan perkawinan harus dilakukan secara lisan oleh salah satu atau kedua calon mempelai, atau kedua calon mempelai, atau oleh orang tuanya atau wakilnya. Tetapi apabila karena sesuatu alasan yang sah pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan secara lisan itu tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis. Selain itu maka yang dapat mewakili calon mempelai untuk memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan adalah wali atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan kuasa khusus. (Penjelasan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 1975).

Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan harus memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu. (Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974).

Hal-hal yang dimuat dalam pemberitahuan tersebut merupakan ketentuan minimal, sehingga masih dimungkinkan ditambahkannya hal-hal lain, misalnya mengenai wali nikah, bagi mereka yang beragama Islam. (Penjelasan Pasal 5 PP No. 9 Tahun 1975).

2. Penelitian Syarat-syarat Perkawinan

Setelah menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, maka Pegawai Pencatat Perkawinan harus meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi atau belum dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang. Selain itu Pegawai pencatat perkawinan juga meneliti hal-hal sebagai berikut :

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa, atau yang setingkat dengan itu;
- b. Keterangan mengenai nama, agama/ kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
- c. Ijin tertulis/ijin Pengadilan, dalam hal salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai usia 21 tahun;
- d. Ijin Pengadilan dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri;
- e. Dispensasi Pengadilan / Pejabat, dalam hal adanya perkawinan;
- f. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kali;
- g. Ijin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri

HAKAM / PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;

- h. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan orang lain.

Hasil penelitian tersebut oleh pegawai pencatat perkawinan ditulis dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Jika dari penelitian tersebut ternyata terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, maka harus segera diberitahukan kepada calon mempelai atau orang tuanya, atau wakilnya.

3. Pengumuman Tentang Kehendak Untuk Melangsungkan Perkawinan

Setelah semua syarat perkawinan terpenuhi, pegawai pencatat harus mengadakan pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan, dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan oleh kantor pegawai pencatat perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Pengumuman tersebut ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan memuat hal ihwal orang yang akan melangsungkan perkawinan, juga memuat kapan dan dimana perkawinan itu akan dilangsungkan (K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia : 19).

Pengumuman tersebut diadakan dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya suatu perkawinan, apabila yang demikian itu diketahuinya bertentangan dengan hukum agamanya dan kepercayaannya itu yang bersangkutan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya (Penjelasan pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975).

4. Saat Pencatatan Perkawinan

Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat. Sedangkan tata caranya dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang sudah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Akta tersebut ditandatangani juga oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.

Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi (Pasal 11 PP No. 9 Tahun 1975)

B. Tujuan Pencatatan Perkawinan

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa setelah ditandatanganinya akta perkawinan, maka secara resmi perkawinan telah tercatat. Akta perkawinan ini menjadi bukti otentik akan adanya perkawinan.

Akta perkawinan menurut pasal 13 PP no. 9 Tahun 1975 harus dibuat dalam rangkap dua, helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan di Panitia pengadilan dalam wilayah kantor pencatat perkawinan itu berada. Sedangkan kepada suami istri masing-masing diberikan salinan akta perkawinan.

Mengemai pencatatan perkawinan ini apakah menentukan sah atau tidaknya perkawinan ada dua pendapat, yaitu :

1. perkawinan adalah sah apabila sudah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. perkawinan hanya sah apabila sudah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kemudian dilakukan pencatatan.

Alasan yang dikemukakan oleh pendapat pertama didasarkan pada :

1. Penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi "... tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ";
2. Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974, sub 4a yang berbunyi "... pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting

dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan (

(Wibowo Reksopradoto, Hukum Perkawinan Nasional; 20).

Dengan demikian pencatatan tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan, tetapi hanya merupakan tindakan administratif saja. Jadi apabila perkawinan tidak dicatatkan,, perkawinan tersebut tetap sah, namun masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Hal ini sesuai dengan Pasal 45 ayat 1 sub a PP No. 9 Tahun 1975.

Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa pencatatan perkawinan menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan. Alasannya adalah,, bahwa pasal 2 ayat 1 dan 2 yang menyatakan :

- "1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

harus dibaca sebagai satu kesatuan. Jadi setelah memenuhi syarat agama dan kepercayaannya itu harus segera disusul dengan pencatatan.

Selanjutnya apabila pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 ini dikaitkan dengan BAB III atau pasal 13 sampai dengan pasal 21 dan BAB IV dari pasal 22 sampai 28 UUP masing-masing mengenai pencegahan atau pembatalan perkawinan hanyalah mungkin bila tatacara pencatatan di tempuh seba-

mana diatur oleh PP No. 9 Tahun 1975. Sehingga bila perkawinan di luar pencatatan sah, maka kedua bab pencegahan dan pembatalan suatu perkawinan tidak ada gunanya. Beberapa pasal PP No. 9 Tahun 1975 menunjang pendapat ini, misalnya pasal 10 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut :

"Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu, perkawinan itu dilakukan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi".

Bila pendaftaran / pencatatan perkawinan itu tidak dianggap sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan, maka banyak perbaikan menuju ke UU yang modern tidak tercapai, misalnya pengawasan poligami, pengawasan perkawinan anak-anak, dan lain-lain (Wibowo Reksopradoto, Hukum Perkawinan Nasional : 21 - 22).

Sehubungan dengan hal ini, Mulyadi, berpendapat bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974). Namun perkawinan yang hanya dilakukan menurut pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut kurang menjamin kepastian hukum adanya perkawinan. Hal ini karena sahnya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan saksi. Sehingga di kemudian hari akan timbul kesulitan-kesulitan apabila perkawinan itu tidak dicatat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kesulitan-kesulitan tersebut misalnya :

1. Bila berhubungan dengan instansi pemerintah, sehubungan dengan perkawinannya, mengenai bukti adanya perkawinan

2. Bila timbul sengketa mengenai sah tidaknya perkawinan yang diajukan ke pengadilan, maka akan timbul kesulitan mengenai bukti adanya perkawinan.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Pencatatan perkawinan merupakan suatu tindakan yang penting dalam pelaksanaan perkawinan, karena dengan pencatatan ini akan dibuat akta perkawinan yang menjadi bukti otentik adanya perkawinan
2. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya adalah sah, meskipun tidak dilakukan pencatatan, karena pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif. Namun demikian perkawinan yang tidak dicatatkan kurang menjamin kepastian hukum.

B. Saran

Mengingat akta perkawinan sangat penting sebagai bukti otentik tentang adanya perkawinan, sehingga bisa menjamin kepastian hukum, maka alangkah baiknya perkawinan yang sudah dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya itu segera diikuti dengan pencatatan perkawinan.

DAFTAR BACAAN

M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (Medan : Zahir Traiding Co, 1975).

Ko Tjay Sing, Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga (Semarang, Seksi Perdata BaratFakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1981.)

Mulyadi, Hukum Perkawinan Indonesia (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1983)

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan (Yogyakarta : Liberty, 1986).

Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta : Intermasa, 1984).

Wibowo Reksopradoto, Hukum Perdata (Barat) Hukum Keluarga Hukum Perkawinan Nasional (Semarang : Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1982)

Wiryono Projodikoro, Hukum Perkawinan Di Indonesia (Bandung : Sumur, 1974).

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.